

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun “Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 ini”.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kemangkon Tahun 2024, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kemangkon Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kemangkon dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD Kecamatan Kemangkon.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 di wilayah Kecamatan Kemangkon. Adapun keberhasilan RENJA OPD ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan atau belum sesuai dengan harapan.

Besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Purbalingga, 28 Juli 2023



SAMAT KEMANGKON

DANANG NUSWANTORO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19780702 199703 1 001

RENCANA KERJA KECAMATAN KEMANGKON TAHUN 2024

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Rencana Kerja OPD Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja OPD. Rencana Kerja OPD memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Kemangkon menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai Permendagri No.54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang.

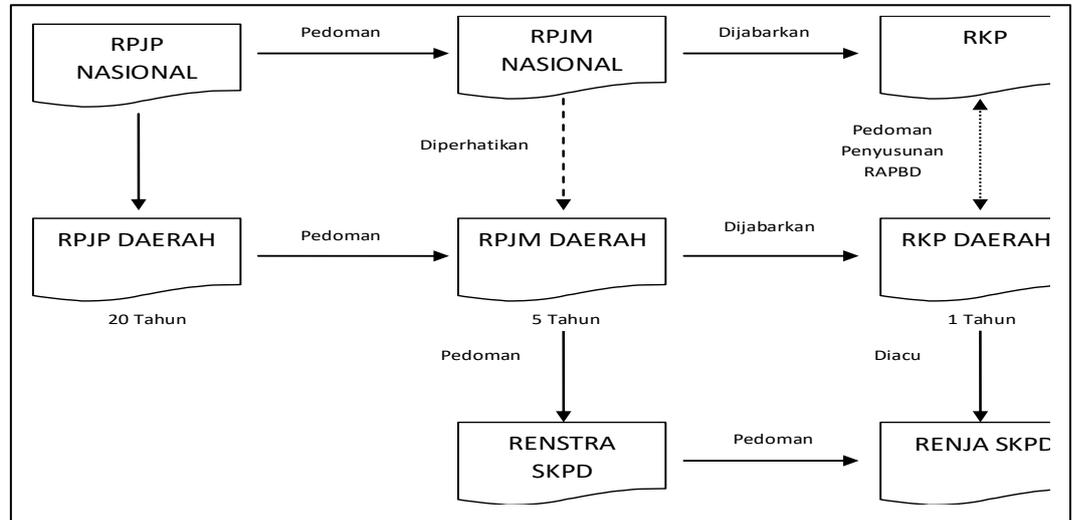
Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **“ Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Penyusunan Renja OPD merujuk pada dokumen Renstra OPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja OPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kemangkon dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja OPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD.

Rencana Kerja OPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :



Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Kemangkon.

1.2 Landasan Hukum .

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 ini, adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
-

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda, tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 050/3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Nomor 11 tahun 2008, tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025;
-

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kemangkon Tahun 2024.

Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kemangkon Tahun 2024.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kemangkon dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Kemangkon Tahun 2022.

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kemangkon Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemangkon.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kemangkon
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Kabupaten Purbalingga
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kemangkon.
- 3.3 Program dan kegiatan Kecamatan Kemangkon

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEMANGKON
TAHUN 2022

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kemangkon Tahun 2022

Rencana Aksi Kerja Kecamatan Kemangkon merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kemangkon, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kantor Kecamatan Kemangkon tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kemangkon tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan
Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2026
Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

Lembar :
dari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
7. UNSUR KEWILAYAHAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%

	KABUPATEN/ KOTA									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	1 dokum en	1 dokum en	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanan ya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	6 dokum en	6 dokum en	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
01.2.01.07	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Dokumen Administras i Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	NA	NA	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	10 Orang / Bulan	10 Orang / Bulan	100%	9 Orang / Bulan	9 Orang / Bulan	100%
01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksanan ya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	6 Kegiata n	6 Kegiata n	100%	laporan	12 laporan	100%

01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.02.04	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

01.2.06.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

		Daya Air dan Listrik								
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	NA	NA	12 unit	12 unit	100%	12 unit	12 unit	100%

01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	11 unit	11 unit	100%	11 unit	11 unit	100%
01.2.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
01.2.09.02	UNSUR KEWILAYAHAN		NA	NA			100%			100%
01.2.09.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	NA			100%			100%
01.2.09.09	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
02.2.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.04	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	14 kegiatan	100%
02.2.04.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

		n Pembangun an di Desa								
03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
03.2.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 laporan	0 laporan	0%	12 laporan	12 laporan	100%
03.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

03.2.01.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	NA	12 Kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
04.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
04.2.01.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Potensi Konflik	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

04.2.01.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	94,74%	94,74%	100%	100%	100%
05.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2022 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib OPD, manajemen keuangan OPD dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Kemangkon Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa sebagian program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kemangkon. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemangkon

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kemangkon berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kemangkon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman
4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Berikut adalah Perbandingan Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat berikut ini :

Tabel 2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2020 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	2020 - 2022		
					2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	80	84	86
				Realisasi	79	83,9	84,02
				% Capaian	98,75	99,88	97,69
		Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Target	NA	NA	62
				Realisasi	NA	NA	57,16 (CC)
				% Capaian	NA	NA	92,19

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi, maka pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kemangkon meliputi :

a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Kecamatan Sesuai SOP
- Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti
- Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan
- Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2022		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti	Persen		100%	50%	50%
2	Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan	Persen	100%	100%	50%	50%
3	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	94,74%	30 - 44%	215%	215%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kemangkon pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Forkompimcam secara berkala (setiap bulan)
 - Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa
 - Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Ormas
 - Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan
- b. Koodinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Cakupan Desa/Kelurahan yang melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2022		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase keaktifan lembaga desa	Persen	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Desa/ Kelurahan Yang Melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan Sesuai Ketentuan	Persen	100%	100%	100%	100%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kemangkon pada tahun 2022 adalah sebagai berikut

:

- Melaksanakan koordinasi kepada Kepala Desa / Sekretaris Desa dan Kasi Perencanaan per dua bulan ;
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan bendahara desa
- Memfasilitasi kegiatan Musdes dan Musdesus pada 19 (sembilan belas) desa
- Memfasilitasi dokumen pengajuan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) baik propinsi maupun kabupaten
- Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan ADD dan DD
Review Kegiatan ADD dan DD

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Tujuan / Sasaran Program	SPM/Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			86	87	87,5	88	84,06	85,34			
	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan			62	70	70	70	70	70	70	70	
	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100	100	100	100	90	90	90	90	
	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah)			100	100	100	100	NA	90	90	90	
	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100	
	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Prosentase pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)			100	100	100	100	99	100	100	100	
7	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			100	100	100	100	93	93	93	93	
B	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan											

1	Nilai evaluasi pelayanan public			NA	3,1	3,2	3,5			3,2	3,5	
2	Prosentase keaktifan Lembaga Desa			100	100	100	100	86	90	90	90	
3	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan			12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100	97	97	97	97	
5	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi			NA	28	35	40	NA	100	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kemangkon

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Kemangkon sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Kemangkon masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

- (1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai;
- (2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal;
- (3) Sumber daya pegawai yang kurang memadai dan;
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***.

dan mempunyai 7 Misi, yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna

mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, inventasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kemangkon, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Kemangkon, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan

pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar.

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya peluang dari kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/ Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik (PATEN), maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha

dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi Desa seluas – luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Kemangkon harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan isu-isu strategis Keadaan yang diinginkan oleh Kecamatan Kemangkon perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.6

NILAI SAKIP KECAMATAN KEMANGKON

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	22,20
Pengukuran Kinerja	18,60
Pelaporan Kinerja	2,10

Evaluasi Internal	14,25
NILAI TOTAL	57,16

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 2.7

TABEL STATUS IDM KECAMATAN KEMANGKON TAHUN 2022

NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
KEMANGKON	3303012008	BAKULAN	0,7886	0,5667	0,6667	0,674	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012002	BOKOL	0,8	0,5333	0,6667	0,6667	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012016	GAMBARSAARI	0,8171	0,7333	0,6667	0,739	MAJU
KEMANGKON	3303012018	JETIS	0,8514	0,5167	0,6667	0,6783	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012013	KALIALANG	0,7657	0,5333	0,6	0,633	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012009	KARANGKEMIRI	0,8114	0,6	0,6	0,6705	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012014	KARANGTENGAH	0,8	0,4333	0,6667	0,6333	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012001	KEDUNGBENDA	0,8457	0,5333	0,6667	0,6819	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012005	KEDUNGLEGOK	0,7714	0,55	0,6667	0,6627	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012006	KEMANGKON	0,7943	0,6167	0,6	0,6703	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012019	MAJASEM	0,8	0,5667	0,8	0,7222	MAJU
KEMANGKON	3303012004	MAJATENGAH	0,7714	0,6667	0,6667	0,7016	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012015	MUNTANG	0,8286	0,5333	1	0,7873	MAJU
KEMANGKON	3303012007	PANICAN	0,9086	0,85	0,6667	0,8084	MAJU

KEMANGKON	3303012010	PEGANDEKAN	0,8	0,6333	0,6667	0,7	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012003	PELUMUTAN	0,8229	0,6667	0,6	0,6965	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012011	SENON	0,8686	0,5667	0,6667	0,7006	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012012	SUMILIR	0,8057	0,55	0,6667	0,6741	BERKEMBANG
KEMANGKON	3303012017	TOYAREKA	0,8571	0,6167	0,8667	0,7802	MAJU

Sumber: Data IDM Tahun 2022

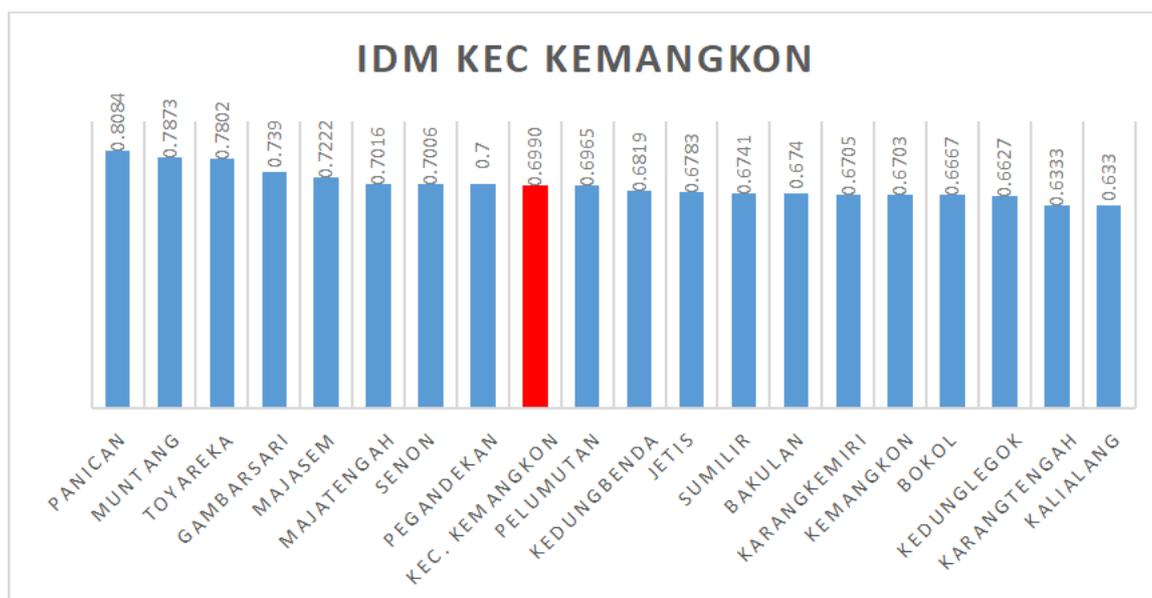
Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Kalialang, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Karangtengah, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Kalialang, Desa Karangkemiri, Desa Kemangkon, dan Desa Pelumutan.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Panican, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Panican, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Muntang.

Terdapat 5 desa dengan status maju, dan 14 desa berkembang.

Gambar 2.8

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Kemangkon Tahun 2022



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 11 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Pelumutan, Desa Kedungbenda, Desa Jetis, Desa Sumilir, Desa Bakulan, Desa karangkemiri, Desa Kemangkon, Desa Bokol, Desa Kedunglegok, Desa Karangtengah, dan Desa Kalialang. Sementara 8 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Panican, Desa Muntang, Desa Toyareka, Desa Gambarsari, Desa Majasem, Desa Majatengah, Desa Senon, Desa Pengadekan.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Kemangkon memiliki 9 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

PROFIL BUMDES KECAMATAN KEMANGKON

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Bumdes Maju Makmur	Desa Majatengah RT 1 RW 1	Kios/toko : jual sembako	Dasar	Majatengah, Kemangkon
2.	BUMDES Berkah	Jl. Raya Kedungbenda-Panican No. 001 Kecamatan Kemangkon	Pertambangan : galian c manual	Tumbuh	Panican, Kemangkon

		Kabupaten Purbalingga			
3.	Mangku Jaya	Jl. Raya Panican Kemangkon, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Ourbalingga ,533 81	<ul style="list-style-type: none"> - Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan) - Jasa : - Perdagangan : - jasa internet - Pertanian : 	Berkembang	Panican, Kemangkon
4.	Sejahtera	Jalan Kartawisesa No 01 Dusun II, Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	<ul style="list-style-type: none"> - Persewaan : sewa tratag - Persewaan : sewa molen 	Tumbuh	Jetis, Kemangkon
5.	Restu Bumi	Muntang RT 10 RW 04, Kemangkon, Purbalingga	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian : pertanian/pengolahan lahan lahan - Air bersih : pengelolaan air bersih - Keuangan : keuangan 	Dasar	Kemangkon
6.	Maju Mandiri	Jalan Raya Desa Senon Rt 005 Rw 002, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan : BBM - Keuangan : Koperasi Simpan Pinjam Primer 	Dasar	Senon, Kemangkon
7.	Peduli Desa	Rt 007 Rw 003 Desa Gambarsari	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan pihak ketiga : BRI Link - Kios/toko : fotocopy 	Dasar	Gambarsari, Kemangkon
8.	Makmur Abadi	Jln Raya Linggamas Bakulan RT		Tumbuh	Bakulan, Kemangkon

		10/RW 04 Kemangkon			
--	--	-----------------------	--	--	--

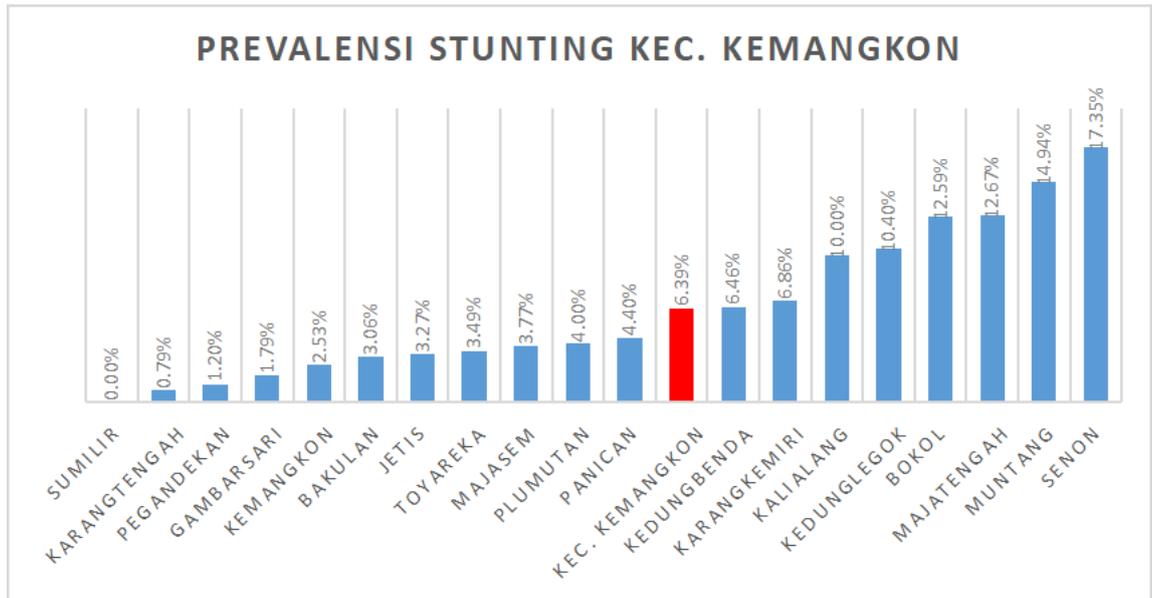
4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KEMANGKON

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KEMANGKON	3350	32	182	214	6,39%
BAKULAN	98	2	1	3	3,06%
BOKOL	135	3	14	17	12,59%
GAMBARSAARI	112	0	2	2	1,79%
JETIS	214	0	7	7	3,27%
KALIALANG	70	0	7	7	10,00%
KARANGKEMIRI	102	1	6	7	6,86%
KARANGTENGAH	127	0	1	1	0,79%
KEDUNGBENDA	294	2	17	19	6,46%
KEDUNGLEGOK	125	1	12	13	10,40%
KEMANGKON	237	0	6	6	2,53%
MAJASEM	212	0	8	8	3,77%
MAJATENGAH	221	3	25	28	12,67%
MUNTANG	87	3	10	13	14,94%
PANICAN	273	0	12	12	4,40%
PEGANDEKAN	167	1	1	2	1,20%
PLUMUTAN	225	4	5	9	4,00%
SENON	294	10	41	51	17,35%
SUMILIR	99	0	0	0	0,00%
TOYAREKA	258	2	7	9	3,49%

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KEMANGKON



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 8 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Kedungbenda, Desa Karangkemiri, Desa Kalialang, Desa Kedunglegok, Desa Bokol, Desa Majatengah, Desa Muntang, dan Desa Senon.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Kemangkong untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

TABEL LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN KEMANGKON

NO	KECAMATAN	DESA
1	KEMANGKON	KEDUNGBENDA

2	KEMANGKON	SENON
---	-----------	-------

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

- a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)
- b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,
- c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan

jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
196	99	236

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
88	149	43

Pada Kecamatan Kemangkon terdapat 196 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 99 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 236 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 88 anak, SMP/SMPLB sejumlah 149 anak, SMA/SMALB sejumlah 43 anak, dan tidak sekolah sejumlah 28 anak.

2.4. Review Terhadap Rencana Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan

- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kemangkon. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kemangkon dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Kemangkon yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Kemangkon sesuai dengan Sistem Pusat Keempatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Kemangkon baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RENCANA KERJA TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIA TAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	128.530.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	128.530.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase ketersediaan Laporan Kinerja	100 %	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	100 %	4.210.000	

7.01.01.2.0 1.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.760.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	4.210.000	
7.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	1.280.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	1.760.000	
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 %	1.276.383.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 %	1.276.383.000	
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	8 Orang	1.230.743.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	8 Orang	1.230.743.000	
7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 dokumen	3.120.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 dokumen	7.252.000	

7.01.01.2.0 2.03	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 dokumen	42.520.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 dokumen	48.900.000	
7.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan atributnya	100 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga			0	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Terkirimnya peserta diklat	2 ASN	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Terkirimnya peserta diklat	2 ASN	0	
7.01.01.02.06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.450.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 %	1.450.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.450.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.450.000	
7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Adm Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	19.822.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Adm Umum dan Jasa Penunjang Urusan	100 %	19.822.000	

			Daerah					Pemerintahan Daerah			
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	550.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	550.000	
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	3.832.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	3.832.000	
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	1.140.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Tersedianya surat kabar/majalah	24 dokumen	1.140.000	
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	9.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	9.900.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Tersedianya jamuan tamu	12 Bulan	0	Fasilitasi kunjungan tamu	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Tersedianya jamuan tamu	12 Bulan	0	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 dokumen	4.400.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	10 dokumen	4.400.000,-	

7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0	
7.01.012.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (home use) lainnya	5 jenis	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (home use) lainnya	5 jenis	0	
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	89.708.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	89.708.000	
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	20 laporan	200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	20 laporan	200.000	
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	29.712.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	29.712.000	
7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah laporan penyediaan jasa perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah laporan penyediaan jasa perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	600.000	

7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	59.196.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	59.196.000	
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	104.222.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	104.222.000	
7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit	88.502.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit	88.502.000	
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 unit	1.120.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 unit	1.120.000	
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	14.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	14.600.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Nilai evaluasi pelayanan public	3,4 angka	5.725.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Nilai evaluasi pelayanan publik	100 %	5.725.000	

7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Nilai evaluasi pelayanan publik	3,4 angka	5.725.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Nilai evaluasi pelayanan publik	3,4 angka	5.725.000	
7.01.02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5.725.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5.725.000	
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Nilai evaluasi pelayanan publik kecamatan kemangk on	3,4 angka	1.830.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Nilai evaluasi pelayanan publik kecamatan kemangk on	3,4 angka	1.830.000	
7.01.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	2 dokumen	1.830.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	2 dokumen	1.830.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	100 %	57.984.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	100 %	57.984.000	
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	12 bulan	57.984.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kemangk on, Kab. Purbaling ga	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	12 bulan	57.984.000	

7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kemangk on, Kab.P urbalingg a	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyar akatan	18.194.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kemangk on, Kab.P urbalingg a	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyar akatan	18.194.000	
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kemangk on, Kab.P urbalingg a	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	6 laporan	39.790.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kemangk on, Kab.P urbalingg a	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	6 laporan	37.790.000	
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kemangk on, Kab.P urbalingg a	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	38.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kemangk on, Kab.P urbalingg a	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	38.000.000	
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kemangk on, Kab.P urbalingg a	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman yang dilaporkan	12 laporan	25.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kemangk on, Kab.P urbalingg a	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman yang dilaporkan	12 laporan	25.200.000	
7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kemangk on, Kab.P urbalingg a	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12.800.000	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kemangk on, Kab.P urbalingg a	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12.800.000	

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg a	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100 %	26.872.000	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg a	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100 %	26.872.000	
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg a	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100 %	26.872.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg a	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100 %	26.872.000	
7.01.05.2.0 1.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	625 Orang	26.872.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	625 Orang	26.872.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg a	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	31 %	12.927.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg a	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	31 %	12.927.000	
7.01.06.2.0 1	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg a	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	31 %	12.927.000	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg a	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	31 %	12.927.000	

7.01.06.2.0 1.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg a	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 dokumen	12.927.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kemangk on,Kab.P urbalingg a	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 dokumen	12.927.000	
	JUMLAH				1.379.651.000	JUMLAH				1.3789.651.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kemangkon juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kemangkon pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Kemangkon maka perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu kecamatan Kemangkon tahun 2024 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**REKAPITULASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA**

RANCANGAN AWAL RKPD						
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN	
1	2	3	4	5	6	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEMANGKON	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEMANGKON	Persentase ketersediaan laporan kinerja			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KEMANGKON	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	1 dokumen		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEMANGKON	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEMANGKON	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 %		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEMANGKON	Jumlah ASN yang gaji dan tunjungannya terbayar tepat	8 Orang/bu		

			waktu	lan		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KEMANGKON	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen		
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	KEMANGKON	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen		
7.01.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KEMANGKON	Persentase Pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 %		
7.01.01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KEMANGKON	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan		
7.01.01.02.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KEMANGKON	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan atributnya			
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	KEMANGKON	Jumlah ASN dan PTT yang terima pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	13 Orang		
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	KEMANGKON	Terkirimnya peserta diklat	-		
7.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEMANGKON	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Adm.Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KEMANGKON	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KEMANGKON	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KEMANGKON	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bulan		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEMANGKON	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	24 dokumen		
7.01.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	KEMANGKON	Jumlah dokumen pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 dokumen		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEMANGKON	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			

7.01.012.07.05	Pengadaan mebeleur	KEMANGKON	tersedianya mebel untuk kantor kecamatan	2 jenis		
7.01.012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEMANGKON	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya Mesin Absensi (Eyes Print)	5 jenis		
7.01.012.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	KEMANGKON	Tersedianya fasilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan		
7.01.012.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	KEMANGKON	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 unit		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEMANGKON				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEMANGKON	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	20 laporan		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEMANGKON	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEMANGKON	Jumlah laporan penyediaan jasa perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEMANGKON	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 laporan		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEMANGKON	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KEMANGKON	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEMANGKON	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 unit		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KEMANGKON	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	KEMANGKON	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KEMANGKON	Nilai evaluasi pelayanan publik kecamatan	3,4 angka		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEMANGKON	Nilai evaluasi pelayanan publik Kecamatan Kemangkon	3,4 angka		

7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEMANGKON	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	KEMANGKON	Nilai evaluasi pelayanan publik Kecamatan Kemangkon	3,4 angka		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	KEMANGKON	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	2 dokumen		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEMANGKON	Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkon			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEMANGKON	Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkon	100 %		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KEMANGKON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEMANGKON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KEMANGKON	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KEMANGKON	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	KEMANGKON	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman yang dilaporkan	12 laporan		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	KEMANGKON	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 laporan		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KEMANGKON	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100 %		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KEMANGKON	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100 %		

7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	KEMANGKON	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	625 orang		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KEMANGKON	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	KEMANGKON	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	31 %		
7.01.06.2.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	KEMANGKON	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 Dokumen		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	KEMANGKON	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	-		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Nasional

Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Jalan perubahan menuju Indonesia Hebat adalah jalan ideologis. Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintahan kami

akan dipandu oleh VISI sebagai berikut: “ TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG “

Upaya untuk mewujudkan Visi terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dirumuskan sembilan agenda aksi dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Kami akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa,
9. Kami akan memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu ***“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”***.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, memasuki pelaksanaan **Tahap Keempat** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan **Tahap Keempat** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;

2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diarahkan untuk ***“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”***.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan dan
-

- f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
 3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
 4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
 5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
-

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kemangkong dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain daripada itu, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kemangkön dalam Renstra Tahun 2021 sd 2026 telah menyusun Program dan Kegiatan sebagai berikut

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
 - I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - b. Peningkatan Sarana dan Parasarana Disiplin Pegawai;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 - I.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - a. Pengadaan Mebel;
-

- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - d. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- I.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- I.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- I.8. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah :
- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- II.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi :
- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- II.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat :
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
-

III.2.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV.Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

IV.1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi :

IV.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

IV.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- c. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

IV.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kemangkon

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Kemangkon, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Kecamatan Kemangkon.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari masing-masing Misi Kecamatan Kemangkon adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.
2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa.
3. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.
5. Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial.
6. Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita.
7. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Tujuan

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah, dengan fokus pada:
 - a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro - kecil secara tepat sasaran, berupa:
 - Fasilitasi proses produksi ;
-

- Fasilitasi permodalan usaha;
 - Pengembangan branding produk Usaha Mikro Kecil Purbalingga
 - Pelatihan kewirausahaan
 - Pengembangan sentra IKM
- b. Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja, antara lain melalui:
- Program Kartu Pra Kerja Purbalingga
 - Mendorong Percepatan Realisasi Investasi
 - Sinergitas Pelatihan Ketrampilan Produktif
- c. Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain melalui:
- Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan pendukung wisata
 - Mendorong Penyelenggaraan Event nasional dan Internasional Peningkatan kapasitas Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif
 - Revitalisasi *Tourism Information Center* (TIC)
 - Penguatan dan Pengembangan Desa Wisata
- d. Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis, antara lain melalui:
- Asuransi Pertanian
 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian
 - Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi
 - Pengembangan Klaster Ikan Hias;
- e. Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat;
- Rehabilitasi Pasar Pemda
 - Rehabilitasi Pasar Desa
 - Sertifikasi Pasar Rakyat
2. Pemenuhan kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain
-

melalui:

- Peningkatan Akses Pangan utamanya bagi kelompok rentan
 - Peningkatkan Akses Air Bersih;
 - Penyediaan Rumah Layak Huni;
 - Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat;
- b. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain melalui:
- Santunan Kematian Bagi Keluarga Kurang Mampu
 - Revitalisasi Rumah Singgah
 - Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial
 - Fasilitasi dan Bantuan kepada PPKS
3. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kinerja
- b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui:
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
 - Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani
- c. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
- Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi
 - Pembangunan Mall Pelayanan Publik
 - Satu OPD satu Inovasi Pelayanan Publik
- d. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, melalui
- Memfasilitasi komunikasi antar dan intern umat beragama
 - Penguatan aparat Trantibum

- Mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat
 - Peningkatan ketahanan bencana Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Keagamaan
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, utamanya melalui
 - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
 - Peningkatan *image* layanan kesehatan pemerintah
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
 - Penguatan tenaga Kesehatan (peningkatan kapasitas SDM kesehatan)
 - Sinergitas Pembiayaan kesehatan murah dan terjangkau
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, utamanya melalui
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadaisesuaiStandar NasionalPendidikan;
 - layananAnak Tidak Sekolah (ATS)
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan distribusi dan komposisi tenagapendidik
 - Peningkatan kualitas LayananPendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peingkatan kualitas layanan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
 - Peningkatan Manajemen Sekolah
 - Pengembangan Kerjasama denganPerguruan Tinggi
 - c. Peningkatan cakupan pelayanan KB
 - d. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak, utamanya melalui:
 - Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - Pembentukan Desa Ramah Anak
-

- Revitalisasi Forum Lintas Perempuan;
- e. Pengembangan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga, utamanya melalui:
 - Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi
 - Fasilitasi berkembangnya olahraga prestasi
- 5. Penguatan Desa, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik,
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah;
 - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui
 - digitalisasi desa
 - pembinaan dan pengawasan administrasi desa
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa
- 6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus;
 - b. Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang;
 - c. Peningkatan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah;
 - d. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kemangkon merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kemangkon selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kemangkon.

Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kemangkong Tahun Anggaran 2021, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 mengacu pada DPA Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
-

- Peningkatan Sarana dan Parasarana Disiplin Pegawai;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
-

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
 - 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
 - 3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
-

2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Kemangkon, dapat dilihat tabel berikut :

TABEL 4.1
RUMUS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024 KECAMATAN KEMANGKON, DAPAT DILIHAT TABEL BERIKUT

Nama Perangkat Daerah Kecamatan Kemangkon

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7	01	01			PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA (GENERIK)		Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	1.582.657.000	APBD	100%	1.582.657.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.648.000	APBD	1 Dokumen	1.648.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1.148.000	APBD	1 Dokumen	1.148.000

						Daerah	Daerah					
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	530.000	APBD	6 Laporan	530.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	1.019.433.000	APBD	100%	1.019.433.000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 org/bln	1.000.747.000	APBD	8 org/bln	1.000.747.000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1.040.000	APBD	4 Dokumen	1.040.000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	14.400.000	APBD	2 Dokumen	14.400.000

7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	2 Laporan	1.450.000	APBD	2 Laporan	1.450.000
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.450.000	APBD	2 Laporan	1.450.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	12 Bulan	19.822.000	APBD	12 Bulan	19.822.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	550.000	APBD	550.000	APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.832.000	APBD	3.832.000	APBD

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	935.000	APBD	935.000	APBD
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	935.000	APBD	935.000	APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	9.900.000	APBD	9.900.000	APBD
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	3.300.000	APBD	3.300.000	APBD

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	... Unit					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	... Unit					
7	01	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	89.708.000	APBD	100%	89.708.000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	20 Laporan	200.000	APBD	100%	200.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	29.712.000	APBD	100%	29.712.000	

					Daya Air, dan Listrik	Sumber Daya Air, dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan					
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000	APBD	100%	600.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	59.196.000	APBD	100%	59.196.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	12 Unit	104.222.000	APBD	100%	104.222.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Pemeliharaan	7 Unit	1.120.000	APBD	100%	1.120.000

						Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	12 Unit	85.816.000	APBD	85.816.000	APBD	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	14.600.000	APBD	14.600.000	APBD	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	3,7			3,7		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Kab. Purbalingga. Kemangkon,		5	108.500.000	APBD	5	108.500.000	

					Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Semua Kelurahan						
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	108.500.000	APBD	108.500.000	APBD
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Pada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	2 Dok	1.830.000	APBD	2 Dok	1.830.000
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	1.830.000	APBD	2 Dokumen	1.830.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua	100%	54.959.000	APBD	100%	54.959.000

							Kelurahan						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Form Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	54.959.000	APBD	100%	54.959.000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.094.000	APBD	6 Lembaga Kemasyarakatan	APBD	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	30.490.000	APBD	6 Laporan	APBD	

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	12 Dok	28.100.000	APBD	12 Dok	28.100.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelengaran Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	12 Laporan	28.100.000	APBD	12 Laporan	28.100.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentraman yang dilaporkan	12 Laporan	20.900.000	APBD	12 Laporan	20.900.000
7	01	04	2.01		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	12 Laporan				

							Tokoh Masyarakat					
7	01	05			PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	24.865.000	APBD	100%	24.865.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	16.311.000	APBD	12 Dok	16.311.000
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	625 Orang	16.311.000	APBD	625 Orang	16.311.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kab. Purbalingga. Kemangkon, Semua Kelurahan	100%	10.270.800	APBD	100%	10.270.800
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan	Kab. Purbalingga. Kemangkon,	31 persen	12.325.000	APBD	18 Desa	12.325.000

						tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	Semua Kelurahan						
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 Dokumen	10.270.800	APBD	19 Dokumen	10.270.800	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	... Dokumen					

**TABEL 4.2
REGISTER RESIKO KECAMATAN KEMANGKON TAHUN 2024**

No	SEBELUM EVALUASI										Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Skala	Skala	Nilai		

	Strategis		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	Dampak	Kemungkinan	Risiko	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan												
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Banyak penerima pelayanan tidak mengisi Form survey IKM	RS001	Camat	Belum memahami arti pentingnya survey pelayanan kecamatan	Eksternal dan Internal	UC	Nilai hasil survey tidak valid	Kecamatan dan Kabupaten	4	4	16	Membuat aplikasi yang memudahkan penerima pelayanan mengisi survey
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Pelayanan publik Kecamatan Kemangkong												
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan ditingkat Kecamatan												
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan tidak disusun secara lengkap	RO01	Kasi Pemrintubum	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	4	3	12	- menyusun notulensi pada setiap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan

	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan												
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan	Lambatnya pelayanan dalam menerbitkan dokumen non perizinan	RO02	Kasi Pemtra ntibum	Budaya kerja SDM pelayanan dikecamatan kurang prima	Internal	C	Pelayanan Masyarakat kurang maksimal	Instansi Kecamatan dan warga masyarakat penerima pelayanan	4	3	12	- membuat inovasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkon												
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan												
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Beberapa usulan desa tidak tersampaikan	RO03	Kasi PMD	Adanya aplikasi baru yang membuat banyak warga kesulitan untuk mengajukan usulan	Eksternal	UC	Usulan tidak menjadi prioritas di kecamatan maupun kabupaten	Desa dan Kecamatan	3	4	12	-melakukan pendampingan pada saat musdes sampai musrenbang kabupaten

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keterlambatan laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	RO04	Kasi PMD, Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Desa dan Kecamatan	3	4	12	Menyusun dokumen laporan segera setelah pelaksanaan kegiatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan												
	Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum												
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentraman yang dilaporkan	Banyak kejadian gangguan trantibum yang tidak terpantau oleh kecamatan	RO05	Kasi Pemtra ntibum	Kurang pahamiya warga masyarakat terhadap alur pengaduan gangguan trantibum	Eksternal	C	Permasalahan warga tidak segera tertangani	Warga dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- Melakukan patroli lingkungan dan sosialisasi secara periodik

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keterlambatan laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	RO06	Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	3	4	12	Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk segera melaporkan apabila ada kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan												
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan potensi konflik												
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Materi tidak dapat diimplementasikan para peserta pasca pembinaan	RO07	Kasi Pemrintubum	Belum terkonsep dengan baik kegiatan pembinaan dan persatuan	Internal	C	Peserta pembinaan tidak bisa menjadi agen perubahan di masyarakat	warga dan instansi Kecamatan	4	3	12	-Mematangkan konsep pembinaan yang akan dilakukan

	Pprogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keterlambatan dokumen dalam administrasi tata pemerintahan desa	RO08	Kasii Pemtra ntibum	Ada desa yang belum menyadari pentingnya pentingnya administrasi tata pemerintahan desa	Eksternal	C	Menghambat pelaksanaan kegiatan desa	Desa dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- monitoring administrasi pemerintahan desa secara intensif

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kemangkon pada Tahun 2023.

Kecamatan Kemangkon sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kemangkon dalam mewujudkan telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kemangkon.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Aksi Kerja Kecamatan Kemangkon Tahun ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk

mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Amin.

Kemangkon, 24 Juli 2023

CAMAT KEMANGKON

DANANG NUSWANTORO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19780702 199703 1 001

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Amin.

Kemangkon, 28 Juli 2023



SAMAT KEMANGKON

DANANG NUSWANTORO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19780702 199703 1 001